

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan sebuah produk pendidikan tidak lepas dari baik atau buruknya sebuah sistem pendidikan di sebuah negara. Sistem pendidikan merupakan sebuah metode atau strategi yang digunakan dalam menjalankan proses pendidikan agar setiap komponen dalam sistem pendidikan tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. metode dan strategi yang di gunakan inilah yang akan mempengaruhi bagaimana berjalannya suatu proses pendidikan di negara tersebut.

Latar belakang munculnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tak lepas dari kinerja pendidikan suatu negara berdasarkan sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Manajemen Berbasis Sekolah atau *School Based Management* adalah terminologi yang diberikan oleh UNESCO di Amerika Utara yang mengacu Kepada:

“ decentralization of decision making, increasing local authority and enhanced autonomy of schools have been common features of the reorganization of public education (menjadikan desentralisasi pengambilan keputusan, peningkatan otoritas

lokal, dan peningkatan otonomi sekolah sebagai fitur dari reorganisasi pendidikan)¹”

Slamet mendefinisikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan bertolak dari kata Manajemen, Berbasis, dan Sekolah yakni:

Manajemen Berbasis Sekolah berarti koordinasi dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, untuk berbasis artinya “berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”, sedangkan sekolah merupakan organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk daya manusia)²

Sedangkan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51, ayat(1) menyertakan, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Selanjutnya, penjelasan pasal 51, ayat (1) menerangkan bahwa, “Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini

¹ Ainley dan MacKenzie, *School Governance: Research on Educational and Management Issues. Paper presented at South Australian Institute for Educational Research, (Adelaide, Australia : Flinder University , 2002), Hal.1*

² Slamet PH, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.27 tahun 2001) hal.

kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”.³

Di Indonesia Manajemen Berbasis Sekolah muncul sebagai akibat dari lambatnya kesadaran para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di Indonesia. hal ini tidak lepas dari sistem pemerintahan otoriter selama orde baru. Semua diatur dari pusat yaitu di Jakarta baik dalam hal penentuan kurikulum sekolah, anggaran pendidikan, pengangkatan guru, metode pembelajaran dan sebagainya sehingga proses pendidikan tidak berjalan secara efektif.⁴

Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia banyak perubahan yang terjadi dalam proses pendidikan yang berjalan sebelumnya. Diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Otonomi Daerah dan Pusat, membuka Peluang kebijakan Pendidikan di Indonesia Mengalami Desentralisasi juga yang salah satu bentuknya yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Kebijakan MBS di Indonesia secara relatif sungguh-sungguh baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Dana

³ Depdiknas, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Lienda, *Latar Belakang Manajemen Berbasis Sekolah*

(<https://lindaajia.wordpress.com/2013/11/04/latar-belakang-manajemen-berbasis-sekolah-mbs/> di akses pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 8.45)

bantuan ini disetor langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya (Dinas Diknas). Memasuki tahun anggaran 2003, dana BOMM itu diubah namanya menjadi *Dana Rintisan untuk MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)*, khususnya untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Program ini sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah di bidang pendidikan dan Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Sedangkan Terminologi MBS atau pendidikan berbasis masyarakat(PBM) dimuat dalam Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Propenas. Menurut Undang-Undang ini MBS dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Perwujudan *school/community – based education* ini ditandai dengan pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota⁵.

Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah untuk mengelola Sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu prinsip Ekuifinalitas, Desentralisasi, Sistem Pengelolaan Mandiri, dan Inisiatif Manusia. Prinsip Ekuifinalitas merupakan prinsip dimana MBS menekankan Fleksibilitas sehingga setiap sekolah harus dikelola oleh warga menurut kondisi mereka masing-masing. Prinsip Desentralisasi ini konsisten dengan

⁵ Hamid, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Al Khwarizmi, Vol1 Maret 2013), hal.87

prinsip Ekuifinalitas, dimana dalam Prinsip Desentralisasi memberikan kewenangan atau otonomi kepada sekolah untuk mengelola sekolah dalam rangka mengefisiensikan proses pengamabilan keputusan. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri merupakan kondisi dimana sekolah diberikan pelimpahan kewenangan oleh birokrasi di atas nya ke tingkat sekolah sehingga sekolah dapat melakukan sistem pengelolaan mandiri. Prinsip Inisiatif Manusia merupakan prinsip dimana sekolah harus memperlakukan sumber daya manusia sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk di kembangkan.⁶

Berdasarkan prinsipnya sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kewenangan kepada sekolah untuk dapat mengelola setiap komponen sekolah secara mandiri berdasarkan atas kebutuhannya dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan sebaik baiknya. Upaya Pengoptimalan sumber daya manusia dalam prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ini salah satunya adalah dengan meningkatkan partisipasi peran masyarakat dalam membantu pengelolaan sekolah. Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru di bantu oleh Komite sekolah .⁷ komite

⁶ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005). Hal.21

⁷ Depdiknas, *op. cit.*

Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaannya sebagai bentuk nyata dari pengalihan pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh pusat menjadi tidak terpusat.⁸

Penyelenggaraan proses pendidikan seharusnya menjadi tugas bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak boleh diabaikan karena salah satu tujuan pendidikan adalah menjadikan siswa agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. Pendidikan juga tidak akan berhasil secara maksimal tanpa dukungan masyarakat.

Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan mengendalikan mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan⁹. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui komite sekolah.

⁸ Murpgy dan Beck, *Site-Based Management and School Success: Untangling the variables. School Effectiveness and School Improvement, (Education Vol4, 2008)*, Hal. 4

⁹ Sumintino, Nora, dan Hamdan Said, *School Committee: an Implementation of School Based Management Policy at School Level in Indonesia*, (Media Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol .IV No.1, 2012), Hal.4

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah.¹⁰ Dibentuknya komite sekolah adalah agar masyarakat sekolah mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat dalam undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmendiknas disebutkan bahwa;

Peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah: (1) sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan pelayanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), (4) *mediator agency* (lembaga penghubung) atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan.¹¹

¹⁰ Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Nimmas Multima, 2006) hal. 170

¹¹ Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2012), hal.73

Sebagaimana peran komite sekolah tersebut, dijelaskan bahwa Komite sekolah berperan sebagai *advisory agency* (pemberi Pertimbangan) dimana Komite Sekolah mempunyai tugas untuk memberikan masukan, gagasan, ide, kritik, dan pandangan mereka dalam setiap proses kegiatan pendidikan termasuk proses perencanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

peneliti mengangkat beberapa jurnal sebagai dasar dari penelitian yang akan di laksanakan, yakni: (1) jurnal yang ditulis Oleh Hasmiana Hasan tentang "Fungsi Komite Sekolah dalam Pengembangan dan Implementasi Program Sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh" ini mengangkat masalah bagaimana fungsi sekolah dalam pengembangan dan implementasi program sekolah di Sekolah Dasar tujuannya adalah untuk mendeskripsikan fungsi komite sekolah dalam pengembangan dan implementasi program sekolah. (2) jurnal berjudul "Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah Di SD-IT Buah hati Kabupaten Pematang" karya Noor Miyono ini mengangkat masalah peran komite sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. (3) jurnal berjudul "Peran Komite Sekolah Terhadap Penerapan Kurikulum" karya Syamsudin ini berisi tentang bagaimana Peran Komite Sekolah dalam mendukung proses implementasi Kurikulum. (4) jurnal berjudul "Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur" Karya Wahyu Dwi Mulyono ini mengangkat

masalah peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. (5) jurnal berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan di Sekolah Dasar Swasta Suster Kecamatan Singkawang Barat” karya Irena Nono, Sukmawati, dan M.Chiar ini mengangkat peran komite Sekolah dalam peningkatan efektivitas layanan di Sekolah Dasar. (6) jurnal berjudul “Fungsi dan Peran Komite Sekolah Dalam meningkatkan Mutu pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya” karya Latief Surjana ini membahas tentang Fungsi dan Peran Komite Sekolah Dalam meningkatkan Mutu.

Berdasarkan *Grandtour* yang telah dilakukan oleh peneliti ke 3 sekolah dasar ditemukan 3 realitas yang cukup berbeda. Peneliti menemukan bahwa di sekolah dasar SD Al-Azhar 13 Rawamangun sekolah mempunyai partisipasi komite sekolah yang cukup tinggi dalam proses penyelenggaraan manajemen sekolah misalnya komite sekolah diikutsertakan dalam proses penyusunan RAPBS/RKAS sehingga mereka juga dapat ikut memutuskan program program apa saja yang akan di jalankan oleh sekolah sehingga program program tersebut nantinya akan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tidak hanya itu komite sekolah di SD Al-azhar 13 ini juga dapat mengusulkan program yang dianggap perlu dalam proses pembelajaran peserta didik. komite sekolah di SD Al-Azhar 13 ini juga mempunyai hak

atas laporan pertanggung jawaban program yang telah berjalan sehingga komite sekolah dapat mengevaluasi hingga melakukan supervisi program tersebut. Alasan peneliti memilih SD Al-Azhar 13 Rawamangun sebagai sampel *grandtour* adalah karena sekolah tersebut merupakan sekolah dengan nama baik yang telah dikenal masyarakat, sekolah tersebut juga merupakan salah satu sekolah unggulan di wilayah Jakarta Timur.

Selanjutnya SD Muhammadiyah 24 Rawamangun Peran Komite Sekolah Terbatas hanya kepada Pemberi Pertimbangan. Mereka hanya memberikan masukan masukan berupa saran atas program program sekolah yang telah ditetapkan dan di jalankan. Mereka juga mendapatkan laporan pertanggungjawaban program yang telah berjalan akan tetapi mereka hanya dapat memberikan pertimbangan berupa evaluasi dan tidak sampai pada tahap supervisi. SD Muhammadiyah 24 dipilih sebagai sampel *grandtour* yang dilakukan peneliti karena seperti halnya SD Al-Azhar 13, SD Muhammadiyah 24 juga merupakan sekolah swasta dengan nama baik yang menjadi unggulan di wilayah tersebut.. Sedangkan di SD Negeri 09 Rawamangun peran komite sekolah yang berjalan sangat minim sekali, Komite Sekolah hanya terlibat dalam mensupport kegiatan sekolah baik dengan materil maupun dengan tenaga, mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah, mereka hanya disosialisasikan hasil dari perencanaan yang dilakukan sekolah. Untuk SD Negeri 09

Rawamangun dipilih karena sekolah tersebut merupakan sekolah negeri yang cukup menjadi favorite di wilayah sekitarnya serta dapat menjadikannya pembandingan dengan 2 sekolah swasta lainnya.

Berdasarkan dari 3 realitas berbeda tersebut yang ditemukan dari hasil *grandtour* yang dilakukan oleh peneliti, menjadi salah satu alasan kenapa Sekolah Dasar menjadi jenjang yang dipilih oleh peneliti sebagai latar penelitian. Selanjutnya peneliti meyakini bahwa sesungguhnya jenjang Sekolah Dasar menjadi jenjang yang paling diperhatikan para orang tua murid dalam proses pendidikan anaknya. Karena sekolah dasar menjadi jenjang yang krusial pada masa tumbuh kembang para siswa. Oleh karena itu penelitian dilakukan pada jenjang Sekolah Dasar di wilayah Kelurahan Rawamangun.

Jakarta Timur sebagai wilayah kota terluas di provinsi DKI Jakarta juga menjadi wilayah dengan jumlah sekolah dasar terbanyak di provinsi DKI Jakarta yaitu berjumlah 640 Sekolah Dasar yang terdiri dari 439 sekolah negeri dan 201 sekolah swasta.¹² Sedangkan Alasan pemilihan wilayah Kelurahan Rawamangun karena dalam wilayah pengawasan ini perbandingan antara Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swastanya jumlahnya tidak terpaut jauh. Lalu dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut cukup heterogen atau

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah*, (<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/1/010000>, di akses tanggal 19 desember 2019 pukul 22.41)

bervariasi mulai dari masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas maupun menengah kebawah mempunyai proporsi yang cukup seimbang. Alasan lainnya adalah karena mayoritas Sekolah Dasar Swasta yang terdapat di wilayah ini merupakan sekolah favorit dan dikenal mempunyai predikat baik.

Berdasarkan hasil *grantour* yang dilakukan oleh Peneliti, Peneliti memutuskan Untuk meneliti tentang: “Peran Komite Sekolah dalam Perencanaan Pendidikan Sekolah Dasar Di Wilayah Kelurahan Rawamangun” sebagai judul dan tema penelitian. Alasan utama Peneliti memilih Tema Peran Komite Sekolah adalah peneliti ingin mengetahui gambaran tentang peran Komite Sekolah dalam Perencanaan pendidikan, di setiap Sekolah Dasar Di wilayah Kelurahan Rawamangun

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Peran Komite Sekolah”. Sedangkan Sub Fokus penelitian ini adalah:

1. Peran Komite Sekolah dalam Analisis Kebutuhan Sekolah
2. Peran Komite Sekolah dalam penetapan tujuan dan sasaran
3. Peran Peran Komite Sekolah dalam penetapan strategi dan metode mencapai tujuan dan sasaran

4. Peran Komite Sekolah dalam penetapan metode monitoring dan evaluasi

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta judul penelitian ini maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam menganalisis kebutuhan sebagai dasar perencanaan?
2. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam penetapan tujuan dan sasaran sekolah?
3. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam penetapan strategi dan metode dalam menjalankan proses kegiatan guna mencapai tujuan?
4. Bagaimana peran Komite sekolah dalam penetapan monitoring dan evaluasi agar proses dan hasil yang didapat sesuai dengan tujuan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris dan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana peran Komite Sekolah sebagai lembaga Pemberi pertimbangan, lembaga pendukung, lembaga

pengontrol, dan lembaga penghubung dalam proses perencanaan pendidikan di satuan pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk keilmuan melalui konsep yang terkait dengan peningkatan peran dan partisipasi komite sekolah dalam proses perencanaan pendidikan di satuan pendidikan

2. Manfaat praktis

a. Bagi Komite Sekolah

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Komite Sekolah untuk ikut berperan serta dalam proses perencanaan pendidikan yang baik sebagai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Peran Komite sekolah dalam proses perencanaan pendidikan di satuan pendidikan

b. Bagi Sekolah

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi sekolah untuk mendorong peran dan Partisipasi komite sekolah untuk ikut bersama melaksanakan proses perencanaan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu

layanan pendidikan. Serta penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi sekolah dalam melaksanakan proses perencanaan pendidikan.

c. Bagi Orang Tua Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan para orang tua atau wali peserta didik untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang diterima anak-anak mereka di satuan pendidikan. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada para orang tua atau wali peserta didik terkait dengan kebutuhan peserta didik dalam proses perencanaan pendidikan.

d. Civitas Program Studi Manajemen Pendidikan

Penelitian ini akan diberikan kepada perpustakaan manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca. Dapat menjadi acuan atau teori referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik yang sama. Menjadikannya sebagai pembanding, serta menggali unsur-unsur lain terkait dengan peran komite sekolah.

e. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman peneliti, pengalaman peneliti bertambah setelah ,melakukan pengamatan langsung terkait peran komite sekolah dalam proses perencanaan pendidikan di satuan pendidikan dasar. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti. Pengetahuan dan wawasan peneliti bertambah setelah peneliti membandingkan hasil pengamatan tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.

